

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **Peranan Produk *Arrum* Dalam pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai Siak Hulu Kabupaten Kampar.** Yang bergerak lembaga keuangan non bank. Yang beralamat Jalan Raya Pandau Permai Siak Hulu Kabupaten Kampar Fex./Telpon. (0761) 678902 / (0761) 7600042

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan dan pelaksanaan produk *Arrum* pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai dalam pengembangan usaha mikro dan kecil serta bagaimana pelaksanaan produk *Arrum* pada pegadaian Syariah Pandau permai ditinjau menurut prespektif ekonomi Islam

Sedangkan yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan dan pelaksanaan produk *Arrum* pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai dalam pengembangan usaha mikro dan kecil serta untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan produk *Arrum* pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai ditinjau menurut prespektif ekonomi Islam

Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan studi lapangan dengan sumber data yang penulis gunakan adalah sumber data primer dan skunder dengan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan metode observasi, wawancara, dan angket. Setelah data terkumpul penulis melakukan analisa data dengan menggunakan deskriptif analitik serta metode penulisan deduktif dan deskriptif. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok karyawan dan kelompok nasabah dengan mengambil seluruh populasi untuk diteliti karena jumlah populasinya terjangkau.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis dapat berkesimpulan bahwa pembiayaan atau pinjaman melalui produk *Arrum* pada Pegadaian Syariah yang disalurkan kepada pengusaha mikro dan kecil sangat baik diterapkan dan dimanfaatkan bagi para pengusaha mikro dan kecil, karena dengan produk ini, pengusaha mikro dan kecil dapat terbantu dalam pengembangan usaha serta penambahan modal sehingga usaha yang dijalani mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup baik, walupun pinjaman ini disertai dengan agunan atau jaminan tetapi tidak memberatkan bagi nasabah. Dalam pengambilan keuntungan Pegadaian Syariah tidak menggunakan sistem bunga akan tetapi menggunakan *tarif ijarah* atau sewa atas barang yang dititipkan sebagai jaminan pembiayaan. Dalam menentukan *ijarah* dihitung berdasarkan dengan nilai taksiran barang jaminan pembiayaan dan disesuaikan dengan harga pasar. Sedangkan dalam penyerahan barang jaminan dilakukan secara fidusia, serta akad yang dilakukan terhadap nasabah yang mengambil produk *Arrum* adalah akad pembiayaan dengan *tarif ijarah*.

## DAFTAR ISI

### LEMBARAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL .....	viii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Batasan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13

### BAB II GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG

#### PANDAU PERMAI SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR

A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai Siak Hulu Kampar .....	15
B. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai Siak Hulu Kampar .....	16
C. Aktivitas Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai Siak Hulu	

	Kampar .....	26
<b>BAB III</b>	<b>LANDASAN TEORITIS</b>	
	<b>A. Ruang Lingkup Pegadaian .....</b>	<b>28</b>
	1. Pengertian Gadai .....	29
	2. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah .....	34
	3. Syarat-Syarat dan Rukun .....	37
	4. Barang Objek Gadai .....	39
	<b>B. Usaha Mikro dan Kecil .....</b>	<b>41</b>
	1. Definisi.....	41
	2. Landasan Hukum Usaha Mikro dan Kecil.....	43
	3. Jenis-Jenis Usaha Mikro dan Kecil .....	46
	<b>C. Tinjauan Islam Tentang Gadai dan Usaha Mikro dan kecil</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV</b>	<b>PERANAN PRODUK AR-RUM DALAM PENGEMBANGAN USAHA</b>	
	<b>MIKRO DAN KECIL PADA PEGADAIAN SYARIAH PANDAU</b>	
	<b>PERMAI SIAK HULU KAMPAR</b>	
	A. Peranan Produk <i>Arrum</i> Dalam Pengembangan Usaha Mikro dan	
	Kecil .....	51
	B. Pelaksanaan Produk <i>Arrum</i> Pada Pegadaian Syariah Cabang	
	Pandau Permai Siak Hulu Kampar.....	53
	C. Pelaksanaan Produk <i>Arrum</i> Pada Pegadaian Syariah Cabang	
	Pandau Permai di Tinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam ...	72
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
	A. Kesimpulan .....	75

B. Saran ..... 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**


Tabel I	Tanggapan responden tentang lama memanfaatkan fasilitas pembiayaan produk <i>Arrum</i> pada PegadaianSyariaPandau Permai .....	59
Tabel II	Tanggapan responden tentang kegunaan produk <i>Arrum</i> bagi Nasabah.....	60
Tabel III	Tanggapan responden tentang kontribusi produk <i>Arrum</i> dalam menentukan kelangsungan .....	61
Tabel IV	Tanggapan responden tentang kemajuan usaha yang dialami setelah pemanfaatan <i>Arrum</i> .....	62
Tabel V	Tanggapan responden tentang penjelasan lebih terperinci dari pihak pegadaian tentang produk <i>Arrum</i> .....	63
Tabel VI	Tanggapan responden tentangkriteria usaha yang di tetapkan pegadaian dalam pembiayaan <i>Arrum</i> .....	64
Tabel VII	Tanggapan responden tentang Prosedur pengajuan pembiayaan <i>Arrum</i> sangat mudah dan tidak berbelit-belit .....	65
Tabel VIII	Tanggapan responden tentang adanya akad yang diikuti bagi nasabah yang akan memanfaatkan pembiayaan <i>Arrum</i> .....	66
Tabel IX	Tanggapan responden tentang pemahaman akad yang dilakukan sangat mudah di pahami bagi nasabah .....	67
Tabel X	Tanggapan responden tentang cicilan pelunasan pembiayaan yang dilakukan bagi nasabah .....	68
Tabel XI	Tanggapan responden tentang pelaksanaan serah terima barang jaminan dilakukan dengan prosedur yang sudah sangat baik bagi nasabah .....	69

Tabel XII	Tanggapan responden tentang jaminan asuransi atas barang yang diserahkan nasabah.....	70
Tabel XIII	Tanggapan responden tentang adanya pemantauan oleh petugas tentang penggunaan dana bagi nasaba .....	71

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif telah mengajarkan dan mengatur segala urusan manusia baik urusan duniawi maupun urusan akhirat, yang tidak hanya diterima bagi umat muslim saja akan tetapi, dapat juga diterima dikalangan non muslim. Setiap umat manusia dianjurkan untuk berusaha dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam Al-Qur'an



Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi;

*dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung” (QS. Al-Jum’ah: 10)<sup>1</sup>*

Salah satu anjuran Islam menyatakan bahwa tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah artinya memberi orang yang berkemampuan jauh lebih mulia dari pada menerima. Maka dari itu, dianjurkan selalu berusaha untuk mencari rezeki secara hakikat yang terbaik menurut Islam adalah melakukan usaha sendiri, baik usaha perdagangan maupun usaha lainnya.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2007), h. 934.

Dalam usaha pertumbuhan perekonomian nasional pada saat ini, perbankan merupakan lembaga keuangan yang sangat penting dalam menunjang keseluruhan program pembiayaan pembangunan, baik sebagai penghimpun dana, sebagai lembaga pembiayaan investasi, maupun sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat luas. Selain lembaga keuangan bank, ada juga lembaga keuangan lainnya seperti Pegadaian Syariah yang juga melakukan kegiatan penyediaan dana atas dasar hukum gadai yang turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah.

Pegadaian Syariah di Indonesia melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip Syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Hal ini, dilatarbelakangi oleh masyarakat Islam diberbagai daerah yang menginginkan berbagai kegiatan pegadaian yang pelaksanaannya sesuai hukum Islam.

Besarnya permintaan warga masyarakat terhadap jasa pegadaian membuat lembaga-lembaga keuangan Syariah juga melirik kepada sektor ini. Padahal Pegadaian juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang pernah diperaktikkan di masa Nabi Muhammad saw, yang amat menjanjikan mendorong perekonomian rakyat untuk dikembangkan<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), h. 15.



Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika pada bulan Januari tahun 2003. menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, Yogyakarta, serta terdapat pula empat cabang kantor pegadaian di Aceh di konversikan menjadi Pegadaian Syariah. Konsep operasional Pegadaian Syariah mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasional, efisiensi dan efektivitas yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Fungsi operasi Pegadaian Syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah atau Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi dibawah binaan divisi Usaha Lain Perum Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengolaanya dari usaha gadai konvensional.<sup>3</sup>

Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan Pegadaian PP 10/1990 menegaskan misi yang harus ditaati oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba dan menghindarkan umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada yang haram. Misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP No. 103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha Pegadaian sampai sekarang.<sup>4</sup>

Pegadaian sebagai lembaga keuangan tidak diperkenankan menghimpun dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya. Giro,

---

<sup>3</sup> Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung. CV: Alfabeta. 2009), h. 3.0

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, ( Yogyakarta: Gadjah mada University Press.2006) h. 116.

deposito dan tabungan sebagaimana halnya dengan sumber dana perbankan, akan tetapi untuk memenuhi kebutuhan dananya pegadaian memiliki suber-sumber dana seperti: Modal sendiri, penyertaan modal pemerintah, pinjaman jangka pendek dari perbankan dan dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.<sup>5</sup> Hal ini ditujukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah dan membina prekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan pinjaman atas hukum gadai, di samping itu, untuk mencega rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ketangan para pelepas uang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga yang sangat tinggi dan berlipat ganda.<sup>6</sup>

Istilah gadai (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut mempunyai nilai ekonomis.<sup>7</sup> Barang yang dititipkan pada si piutang dapat kembali dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara nasabah dengan Pegadaian.<sup>8</sup> Gadai dalam fiqih di sebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Sedangkan menurut *syara'* artinya menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat

---

<sup>5</sup> Dahlan Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1999), h. 452.

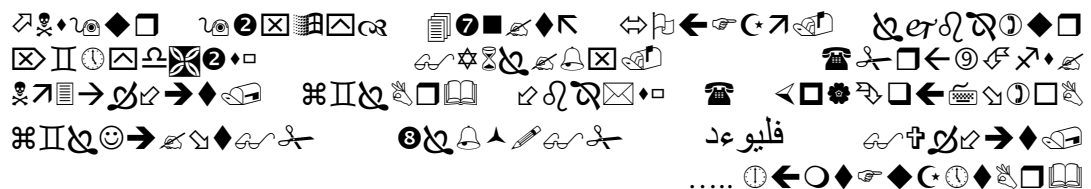
<sup>6</sup> Faried Wijaya, *Perkreditan, Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: BPFE, 1991), h. 163.

<sup>7</sup> Muhammad Syfi'i Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Peraktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 128.

<sup>8</sup> Mustafa Edwin Nasution dan Dkk, *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 314.

diambil kembali sebagai tembusan.<sup>9</sup> Hukum gadai boleh sama seperti jual beli.<sup>10</sup>

Sebagaimana dijelaskan Allah SWT dalam Al-qur'an



Artinya “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang

*kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). ... (Al-Baqarah:283)<sup>11</sup>*

Ayat di atas menjelaskan bahwa membolehkan gadai pada waktu bepergian (musafir) dan ketika berada ditempat domislinya, hal ini pernah di praktik Nabi Muhammad Saw. Saat melakukan perjanjian gadai dengan orang Yahudi di kota Madina.<sup>12</sup>

Operasi Pegadaian Syariah menggambarkan hubungan di antara nasabah dan Pegadaian. Adapun teknis Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut:

1. Nasabah menjaminkan barang kepada Pegadaian Syariah untuk mendapatkan pembiayaan, kemudian Pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa Edisi 2, 2004), h. 156.

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab* (Jakarta: Darul Ulum Press. 2001), h. 257.

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah Edisi Tajwid*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), h. 71.

<sup>12</sup> Veithzal Rivai, Dkk, *Bank and Financial Institution Managemen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1340

2. Pegadaian Syariah dan nasabah menyetujui *akad* gadai. *Akad* ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya gadaian dan jatuh tempo gadai
3. Pegadaian Syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah
4. Nasabah menembus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.<sup>13</sup>

Perkembangan produk-produk berbasis Syariah kini telah berkembang di Indonesia, seperti produk-produk perbankan maupun produk pegadaian. Pada dasarnya, produk-produk berbasis Syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dan berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan bagi hasil. Sedangkan di bidang pegadaian dengan berperan sebagai jembatan bagi masyarakat yang lebih mampu untuk membantu lapisan masyarakat menengah kebawah. Pegadaian juga peduli dengan pengusaha mikro dan kecil di Indonesia dan mendorong adanya kebijakan *pro poor* (kebijakan yang perduli kepada masyarakat kecil), *pro job* (upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan) dan upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional.

Pegadaian Syariah terus mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk *Ar-rum* yang mana di peruntukkan untuk usaha Mikro dan kecil. Produk ini merupakan fasilitas pinjaman atas pembiayaan untuk keperluan usaha para nasabah atau pinjaman berprinsip

---

<sup>13</sup> Heri Sudarsono, *Op.cit*, h. 170.

Syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor dan mobil.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang dikatakan Wasis Djuhari, Direktur Pengembangan Usaha Perum pegadaian. produk ini masih relatif baru diluncurkan kini terus mengalami perkembangan yang sangat menggembirakan dan pertumbuhannya sangat meyakinkan. Awal tahun 2008 produk *Ar-rum* sudah dikembangkan di 30 kantor cabang Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia dengan anggaran mencapai Rp.30 miliar, dan saat ini diperbesar skalanya dengan pertumbuhan mencapai 60 persen dari tahun sebelumnya.

Produk *Ar-rum* ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah untuk dikembangkan mengingat produk ini lebih diperuntukkan bagi pengusaha mikro dan kecil, terutama dalam usaha peminjaman untuk pembiayaan atau permodalan. Bagi pengusaha mikro dan kecil tersebut umumnya merupakan pintu masuk yang relatif mudah bagi mereka yang akan menjadi pengusaha pemula. Berkembangnya usaha mikro dan kecil di masyarakat yang akhirnya dapat memberikan kesempatan berusaha dan mampu menyerap tenaga kerja sekaligus mengurangi pengangguran dan kemiskinan di masyarakat.

Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai Siak Hulu Kampar adalah salah satu pegadaian yang beroperasi secara Syariah yang juga menawarkan produk *Ar-rum* kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan dana dengan mudah dan cepat tanpa

---

<sup>14</sup> Brosur Pegadaian Syariah

dipersulit dengan sistem gadai Syariah dengan agunan berupa emas perhiasan, berlian, elektronik dan kendaraan berupa motor dan mobil.

Pelaksanaan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai Siak Hulu berbeda dengan pegadaian konvensional lainnya, hal ini dapat dilihat dalam produk yang ditawarkan tidak dimiliki oleh pegadaian konvensional.

Sebelum memberikan pembiayaan atau pinjaman kepada para pengusaha mikro dan kecil melalui produk *Ar-rum*, Pegadaian Syariah Pandau Permai terlebih dahulu melihat kondisi usaha nasabah yang dijalankan. Usaha yang layak diberikan pinjaman antara lain, usaha yang telah berjalan satu tahun dan tempat usaha menetap atau tidak berpindah-pindah lokasi.

Adanya produk *Ar-rum* yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Pandau Permai untuk para pengusaha mikro dan kecil yang diharapkan dapat terbantu dalam skim pinjaman untuk peningkatan usaha, serta dapat meningkatkan omzet pendapatan dan penghasilan, namun, apakah pembiayaan ini betul-betul telah dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh nasabah sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengusaha mikro dan kecil serta terhadap perekonomian pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti lebih dalam terhadap produk *Ar-rum* pada Pegadaian Syariah dengan judul: ***“Peranan Produk Ar-rum Dalam Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai Siak Hulu Kabupaten Kampar”***.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat mengemukakan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan produk *Ar-rum* pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai dalam pengembangan usaha mikro dan kecil?
2. Bagaimana pelaksanaan produk *Ar-rum* pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai dalam pengembangan usaha mikro dan kecil?
3. Bagaimana pelaksanaan produk *Ar-rum* pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai ditinjau menurut perspektif ekonomi Islam?

## **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, yang menjadi batasan masalah adalah berkenaan dengan peranan produk *Ar-rum* pada pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai dalam pengembangan usaha mikro dan kecil dan pelaksanaan produk *Ar-rum* pada pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai dalam pengembangan usaha mikro dan kecil serta pelaksanaan produk *Ar-rum* pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai di tinjau menurut perspektif ekonomi Islam

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui peranan produk *Ar-rum* pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai dalam pengembangan usaha mikro dan kecil
2. Untuk mengetahui pelaksanaan produk *Ar-rum* pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai dalam pengembangan usaha mikro dan kecil
3. Untuk mengetahui pelaksanaan produk *Ar-rum* pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai di tinjau menurut perspektif ekonomi Islam

#### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penulis harapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat bagi peneliti adalah dapat dijadikan sebagai wadah dalam mengaplikasikan teori-teori yang di peroleh selain di bangku kuliah dalam prakteknya di lapangan
2. Manfaat bagi objek peneliti adalah dapat di jadikan sebagai masukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabag Pandau Permai Siak Hulu Kampar dalam mengembangkan produk yang di tawarkan nya tentunya produk *Ar-rum*
3. Manfaat bagi lembaga akademik adalah dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama.



## **F. Metode Penelitian**

Studi ini adalah studi lapangan, dimana data dan sumber datanya diperoleh dari sumber-sumber yang sesuai dengan permasalahan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut

### **1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan di laksanakan pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai yang beralamat di Jalan. Raya Pandau Permai Siak Hulu Kampar. Rencana penelitian dilakukan selama 3 bulan, akan tetapi penulis dapat menyelesaikan kurang lebih 1 bulan dimulai dari tanggal 11 Juni-8 Juli 2010.

### **2. Populasi dan Sampel**

Adapun populasi dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu dari kelompok karyawan pegadaian dan dari kelompok nasabah yang memanfaatkan produk *Arrum*. Dari kelompok karyawan yang berjumlah 5 orang dengan tetap sample yang mewakili yaitu Pimpinan Pegadaian Syariah Pandau Permai, sedangkan dari kelompok nasabah yang berjumlah 12 orang, karena dalam penelitian ini jumlah populasinya terjangkau maka seluruh populasi dalam penelitan ini dijadikan sampel.

### **3. Subjek dan Objek**

- a. Sebagai Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan dan nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai Siak Hulu Kampar yang memanfaatkan produk *Arrum*.

- b. Sebagai Objek dalam penelitian ini adalah peranan produk *Ar-rum* dalam pengembangan usaha mikro dan kecil pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai.

#### **4. Sumber Data**

- a. Data primer yaitu data informasi yang di peroleh langsung dari subjek peneliti dan diolah oleh peneliti
- b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan baik dari sumber buku bacaan maupun dari lembaga pegadaian ataupun dari lembaga yang terkait.

#### **5. Metode Pengumpulan Data**

- a. Observasi yaitu data yang diperoleh dengan turun langsung kelapangan tempat penelitian yang akan diteliti
- b. Wawancara yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai Siak Hulu
- c. Angket yaitu memberikan pertanyaan tertulis tentang objek peneliti kepada nasabah

#### **6. Analisa Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik, dalam tehnik ini penulis mengumpulkan semua data yang diperlukan kemudian disesuaikan dengan teori, komentar kemudian dianalisa.

## **7. Metode penulisan**

- a. Deduktif yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus
- b. Deskriptif yaitu menganalisa data yang bersifat penjelasan atau penguraian dari data informasi dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori dan konsep yang mendukung pembahasan yang relevan

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis akan memaparkan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

### **BAB II : Gambaran Umum**

Pada bab ini merupakan gambaran secara umum mengenai Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai yang antara lain tentang sejarah singkat perusahaan, aktifitas perusahaan dan serta struktur organisasi

### **BAB III : Tinjauan Teoritis**

Dalam bab ini terdiri dari sejarah pegadaian, pengertian gadai, aspek pendirian Pegadaian Syariah, syarat dan rukun gadai, barang yang boleh digadaikan dan jaminan gadai, dan tinjauan umum usaha mikro dan

kecil diantaranya. Pengertian usaha mikro/kecil, landasan hukum usaha mikro dan kecil jenis-jenis usaha mikro/kecil.

#### BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan hasil penelitian yang telah dilakukan yang mengenai peranan dan pelaksanaan produk *Ar-rum* pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai dalam pengembangan usaha mikro dan kecil dan pelaksanaan produk *Ar-rum* pada Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai di tinjau menurut perspektif ekonomi Islam

#### BAB V : Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini adalah dikemukakan tentang kesimpulan dan saran hasil dari penelitian ini beserta saran yang dikemukakan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH**

#### **CABANG PANDAU PERMAI**

##### **A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai Siak Hulu Kampar**

Cabang Pegadaian Syariah Pandau Permai di buka pada tanggal 28 November 2008 yang beralokasi di daerah Pandau Permai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang di tetapkan berdasarkan keputusan Pemimpin Wilayah (KANWIL) II. PERUM Pegadaian Pekanbaru No. 402/OP 1.18001/2008, tentang pembukaan kantor Cabang Perum Pegadaian Syariah di Pandau Permai Kabupaten Kampar.<sup>1</sup>

Berdasarkan keputusan direksi Perum pegadaian Nomor 96/LB.1.00/2009 di KANWIL II tentang pembukaan Kantor Cabang Pegadaian Syariah Pandau Permai menimbang dan menyatakan bahwa:

1. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai dengan Syariat Islam maka Perum Pegadaian sebagai lembaga yang bergerak disektor usaha penyaluran pinjaman perlu merespon tuntutan konsumen.
2. bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang telah dilakukan oleh tim Kantor Wilayah II di Pekanbaru, telah memenuhi persyaratan untuk

---

<sup>1</sup> Muthia Darma (Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Pandau Permai) Wawancara, 21 Juni 2010

mendirikan Kantor Cabang Pegadaian Syariah di Jln. Raya Pandau Permai  
Nomor 6 Desa Pandau Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Provinsi Riau

3. bahwa pembukaan Kantor Cabang Pegadaian Syariah tersebut perlu di  
tetapkan dengan surat keterangan direksi Perum Pegadaian.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perum  
Pegadaian dan keputusan menteri Negara BUMN No : KEP-74/MBU/2008 tanggal 28  
April 2008.<sup>2</sup>

Adapun karyawan Pegadaian Syariah Pandau Permai terdiri dari:

- |                 |                                     |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1 Muthia Darma  | : Sebagai Pimpinan Cabang           |
| 2. Amsal Fuad   | : Sebagai Pegawai                   |
| 3. Yogi Wirawan | : Pembantu ADM                      |
| 4. Ilham        | : OB                                |
| 5. Jhon Badri   | : Sebagai Penjaga Keamanan (Polisi) |

## **B. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai Siak Hulu Kampar**

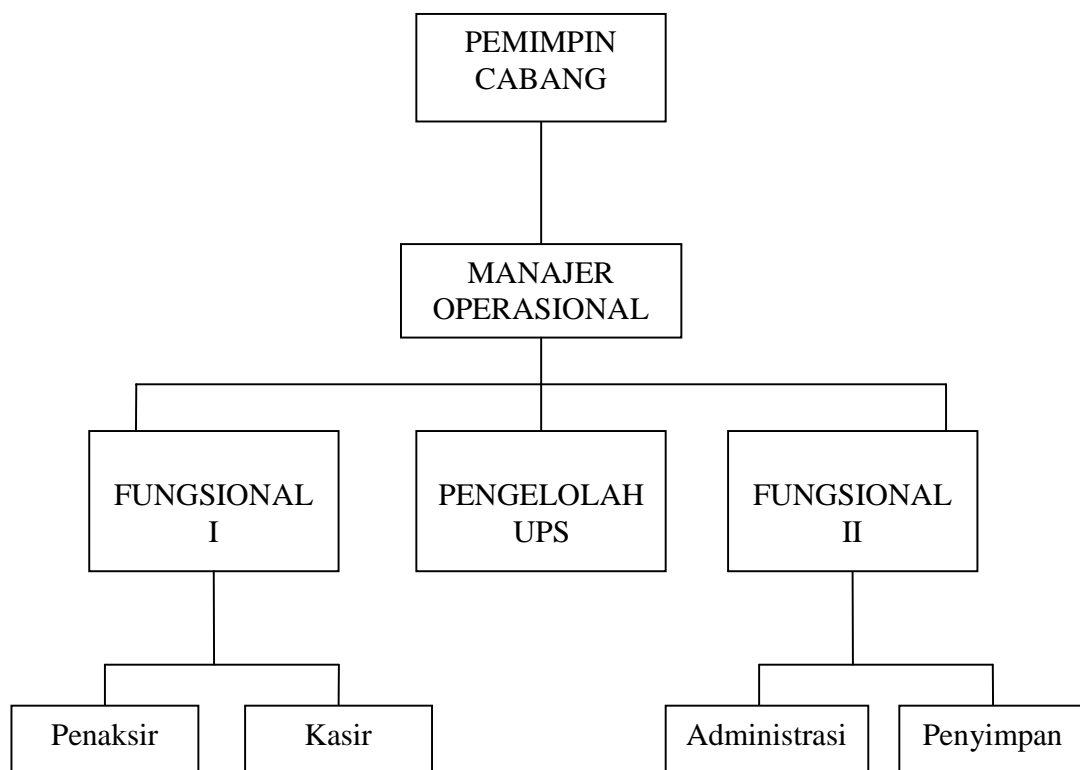
Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam menjalankan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan, organisasi dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas, fungsi dan serta tanggung jawab dalam setiap pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Perum Pegadaian Syariah Cabang

---

<sup>2</sup> Dokumen Pegadaian Syariah Pandau Permai

Pandau Permai sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang dan serta tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**GAMBAR. II. I**  
**STRUKTUR ORGANISASI PEGADAIAN SYARIAH CABANG PANDAU**  
**PERMAI SIAK HULU KAMPAR**



**Sumber:** Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai Siak Hulu Kampar.

Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian Cabang Perum Pegadaian Syariah Pandau Permai Siak Hulu adalah sebagai berikut:

### **1. Pemimpin Cabang**

Pemimpin Cabang mempunyai tugas- tugas sebagai berikut:

#### **1. Tugas Pokok**

1. Mengurus rencana kerja dalam anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan
2. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional *Rahn*
3. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan operasional usaha
4. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pembagian-pembagian tugas
5. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan dan penatausahaan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu)
6. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan dan mengawasi barang jaminan
7. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan modal kerja
8. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan pemasaran dan pelelangan konsumen



9. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan penguasaan sarana dan prasarana
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan
11. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan
12. Menyelenggarakan penatausahaan dan laporan kantor Cabang Pegadaian Syariah dan UPS

## **2. Tugas Tambahan**

1. Melaksanakan tugas pekerjaan *rahn* internal perusahaan
2. Melaksanakan tugas pekerjaan *rahn* eksternal perusahaan
3. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan

## **3. Hubungan Kerja**

1. Dengan direksi dalam hal tugas kerja
2. Dengan Pemimpin Wilayah yang membinanya
3. Dengan pemeriksa
4. Dengan pejabat/pegawai bawahanya
5. Dengan inspektur wilayah
6. Dengan Kantor Cabang Pegadaian Syariah lainnya dalam hal kegiatan dan sarana kerja
7. Dengan kantor pusat dalam hal sarana kerja
8. Dengan unit kerja lain perusahaan
9. Dengan pihak lain dalam hal pelaksanaan tugas pekerjaan (bank di mana KCPS) tersebut membuka rekening, samsat, notaris dan kantor asuransi.

#### **4. Wewenang**

1. Menggunakan rencana kerja anggaran
2. Menetapkan taksiran
3. Mengelola modal kerja
4. Menandatangani cek bank
5. Mengelola barang jaminan
6. Menugaskan bahwa untuk melakukan tugas lain selain kerja
7. Menjatuhkan hukum disiplin sesuai kinerjanya
8. Melakukan penilaian pegawai
9. Membuat laporan kepada Pemwil tentang kendala pelaksana operasional KCPS
10. Mewakili Direksi/Pemwil

#### **5. Tanggung Jawab**

1. Tersusun program kerja operasional Cabang Syariah dengan baik dan benar
2. Tersalurkanannya uang pinjaman, pengembalian uang kelebihan dan kewajiban pembiayaan lainnya dengan tepat dan akurat
3. Terselenggarakan nya lelang secara transparan
4. Terjalinya hubungan baik dengan nasabah dan masyarakat
5. Terjaminnya barang jaminan nasabah secara utuh dan baik
6. Terkoordinasinya, terlaksana dan terkontrolnya tugas pekerjaan dengan baik dan benar
7. Terlaksananya promosi dan mutasi pejabat pegawai bawahan

8. Tepatnya taksiran
9. Terawatnya aktiva
10. Terselenggaranya administrasi kantor dengan benar
11. Tersampainya laporan pertanggung jawaban tentang pekerjaan
12. Tersampainya laporan pendukung operasional kantor CPS.

## **2. Manajer Operasional**

Manajer operasional juga mempunyai tugas-tugas di antaranya:

### **1. Tugas Pokok**

1. Merancang mengkoordinasi, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional usaha non *rahn*
2. Merencanakan mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional usaha *rahn*
3. Mengawasi kredit macet serta asuransi kredit
4. Menagani barang jaminan bermasalah (taksiran terlalu tinggi, rusak, palsu)
5. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan
6. Membinaya bawahan dalam rangka pembinaan pegawai

### **2. Tugas Tambahan**

1. Melaksanakan tugas pekerjaan non rutin internal perusahaan
2. Melaksanakan tugas pekerjaan non rutin eksternal perusahaan atas perintah atasan

### 3. Hubungan Kerja

1. Dengan PCPS
2. Dengan manajer operasional usaha *rahn*
3. Dengan pendukung administrasi dan hubungan pegawai bawah
4. Pelaksanaan lelang dengan baik dan transparan
5. Masyarakat menerima informasi tentang Pegadaian Syariah
6. Hubungan baik dengan nasabah dan pihak-pihak lainnya
7. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas operasional
8. Pelayanan terbaik kepada nasabah
9. Administrasi PCPS yang tertib dan benar
10. Pemeliharaan sarana dan prasarana kerja dengan baik
11. Surat penjatuhan hukum disiplin sesuai kewenangannya
12. Penilaian prestasi kerja bawahan.

### 4. Tanggung Jawab

1. Menerima barang jaminan selain dari bagian manajer operasional usaha *rahn* operasional atau KCPS
2. Merawat barang jaminan dan gudang penyimpanan agar barang jaminan baik dan aman
3. Melakukan pengelompokkan barang jaminan sesuai dengan ketentuan serta menyusunnya sesuai urutan nomor SAR dan mengatur penyimpanan
4. Melakukan pencatatan dan pengadministrasian mutasi (penambahan/pengurangan) barang jaminan menjadi tanggung jawab

### **3. Fungsional I dan II**

Fungsional mempunyai tugas sebagai berikut:

#### **1. Tugas Pokok**

1. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman
2. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang jaminan yang akan dilelang
3. Merencanakan dan mengiginkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan
4. Mengkoordinasikan melaksanakan dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang
5. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran
6. Menimbang pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan.

#### **2. Hubungan Kerja**

1. Dengan pemimpin CPS
2. Dengan manajer operasional usaha *rahn*
3. Dengan pendukung administrasi pembayaran pemegang gadai

### **3. Wewenang**

1. Menjaga kebutuhan, peraturan kerja menaksir
2. Memberikan informasi seperlunya kepada nasabah berkaitan dengan barang jaminan
3. Menetapkan taksiran sesuai barangnya
4. Mengelolah administrasi keuangan KCPS

### **4. Tanggung Jawab**

1. Tepatnya taksiran dan bagian uang pinjaman yang diberikan oleh nasabah

### **5. Tempat Kerja**

Di dalam dan di luar ruangan

### **6. Formasi**

Penaksir hanya 2 sampai dengan 3 orang.

1. Penaksir bertugas sebagai menaksir barang jaminan nasabah untuk dapat dijadikan dasar peminjaman yang dapat diberikan nasabah
2. Kasir bertugas sebagai penerima uang setoran pengembalian dan pinjaman serta pembayaran lainnya
3. Administrasi bertugas dalam pengelola
4. Penyimpan bertugas sebagai menyimpan barang jaminan nasabah di tempat yang aman dan baik

### **4. Pengelolah UPS**

Adapun tugas pengelolah UPS dapat dilihat sebagai berikut:

### **1. Tugas Pokok**

1. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi kegiatan operasional UPS
2. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan setelah jatuh tempo
3. Melakukan pengawasan secara uji dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk
4. Mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengawasi administrasi kegiatan sarana dan prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan secara pembuatan laporan kegiatan operasional UPS
5. Melaksanakan, penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dan dalam rangka dan menetapkan golongan taksiran dan uang jaminan
6. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan (BJ) yang akan di simpan agar terjamin keamanannya.

### **2. Tugas Tambahan**

1. Membantu menyelesaikan tugas pekerjaan administrasi
2. Menjadi anggota panitia serah terima PCPS
3. Mengerjakan tugas pekerjaan lain yang diberikan PCPS sesuai peraturan yang berlaku.

### **3. Hubungan Kerja**

1. Dengan PCPS
2. Dengan Manajer operasional usaha *rahn*
3. Dengan pendukung administrasi dan pembayaran

4. Dengan penaksir

#### **4. Tanggung Jawab.**

1. Kebenaran jumlah barang jaminan, kerapian, kebersihan dan keamanan
2. Kebenaran laporan barang jaminan

#### **5. Wewenang**

1. Megajukan kebutuhan peralatan untuk menjaga kebersihan dalam gudang
2. Memberikan informasi seperlunya kepada nasabah berkaitan dengan barang jaminan yang di serahkan

#### **6. Tempat Kerja**

Dalam dan diluar ruagan

#### **7. Formasi**

Pelaksananya hanya 1 orang.<sup>3</sup>

### **C. Aktivitas Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai Siak Hulu Kampar**

Perum Pegadaian merupakan badan usaha milik Negara yang bergerak dalam bidang jasa keuangan bukan bank dengan kegiatan utamanya menyalurkan pinjaman kepada masyarakat selain dari pada itu pegadaian juga dibuka dengan maksud untuk melayani dan membantu serta menolong para nasabah yang sedang mengalami kesulitan dalam segi ekonomi yang lemah dengan sistem gadai.

Pegadaian Syariah Pandau Permai mempunyai 3 produk yang unggul diantaranya:

---

<sup>3</sup> *Ibid*



1. Gadai Syariah (*Ar-Rahn*) adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai Syariah dengan agunan berupa emas perhiasan, berlian, elektronik dan kenderaan bermotor
2. Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan mulia penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel
3. *Ar-rum* (Ar Rahn untuk Usaha Mikro dan Kecil) melayani skim pinjaman bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran dan menggunakan jaminan BPKB motor dan mobil.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Brosur Pegadaian Syariah

### **BAB III**

#### **TINJAUAN TEORITIS**

##### **A. Ruang Lingkup Pegadaian**

Sejarah dunia usaha pegadaian pertama kali dilakukan di Italia, kemudian meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya seperti Inggris, Prancis dan Belanda. Oleh orang-orang Belanda, lewat pihak VOC, usaha pegadaian di bawa masuk ke Hindia Belanda.

Pegadaian di Indonesia dimulai pada zaman penjajahan Belanda, di mana ketika itu tugas pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjamkan uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dengan status Dinas pegadaian.

Awal kemerdekaan Republik Indonesia, pegadaian dikelola oleh pemerintah Indonesia dan telah beberapa kali berubah statusnya, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan PP No.10/1990 yang diperbaharui dengan PP No.103/2000 berubah lagi menjadi Perusahaan Umum (PERUM) hingga sekarang. Hingga saat ini lembaga yang melakukan usaha yang berdasarkan atas hukum gadai hanyalah Perum Pegadaian.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai, Dkk, *Bank and Financial Institution Managmen*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 1317.

## 1. Pengertian Gadai

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank, di Indonesia yang mempunyai aktivitas membiayai kebutuhan masyarakat, baik bersifat produktif maupun bersifat konsumtif, dengan menggunakan hukum gadai. Pada dasarnya transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pegadaian sama dengan pinjaman melalui lembaga perbankan, namun yang membedakan adalah dasar hukum yang digunakan yaitu hukum gadai.<sup>2</sup>

Gadai diadakan dengan persetujuan antara kedua belah pihak dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si piutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang si berutang belum lunas, tapi ia tak berhak menjual barang tersebut, jika si berutang tidak sanggup atau tidak mampu membayar maka barang tersebut akan dilelang untuk menutupi utang si piutang, jika hasil penjualan barang gadai itu lebih besar daripada utang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si penggadai.<sup>3</sup>

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak

---

<sup>2</sup> Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks, 2006), h. 271.

<sup>3</sup> Ali Hasan, *Masil Fiqiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 123.

yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Perusahaan Umum Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pinjaman untuk keperluan usaha maupun untuk pembiayaan lainnya dalam bentuk penyaluran dana kemasyarakad atas dasar hukum gadai seperti yang dimaksud dalam kitab Undang-Undang perdata pasal 1150 di atas. Tugas pokok pegadaian adalah memberikan pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan yang mengandung unsur bunga yang berlipat ganda dan unsur riba.<sup>4</sup>

Menurut pendapat imam Ibnu Qudhamah dalam *kitab Al-Mugbni rahn* adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu barang untuk di penuhi dari harganya, apabila berutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan menurut pendapat Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya *Fathul Wahul*, mendefenisikan *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari sautu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut pendapat penulis gadai adalah menahan salah satu harta orang yang berhutang dan diserahkan kepada orang yang berpiutang sebagai jaminan

---

<sup>4</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), Edisi Ke 5, h. 443.

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisa Edisi 2, 2004) h, 157.

kepercayaan, agar diantara sala satunya tidak saling meragukan, sedangkan barang tersebut dapat di perjual-belikan dan barang tersebut dapat dimiliki kembali setelah jatuh tempo, jika orang yang berhutang tidak sanggup melunasi hutangnya maka barang yang di pegang oleh orang berpiutang dapat dimiliki dan dilelang untuk melunasi hutang nasabah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pegadaian mempunyai ciri-ciri, antara lain:

1. Terdapat barang-barang berharga yang digadaikan
2. Nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan
3. Barang yang digadaikan dapat ditembus kembali.<sup>6</sup>

Adapun tujuan usaha pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah
2. Untuk masyarakat ingin mengetahui barang yang dimilikinya, pegadaian memberikan jasa taksiran untuk mengetahui nilai barang
3. Meyediakan jasa titipan pada masyarakat yang ingin menyimpan barangnya
4. Memberikan kredit kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan tetap seperti karyawan
5. Menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai

---

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan liannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet, 6, h. 250.

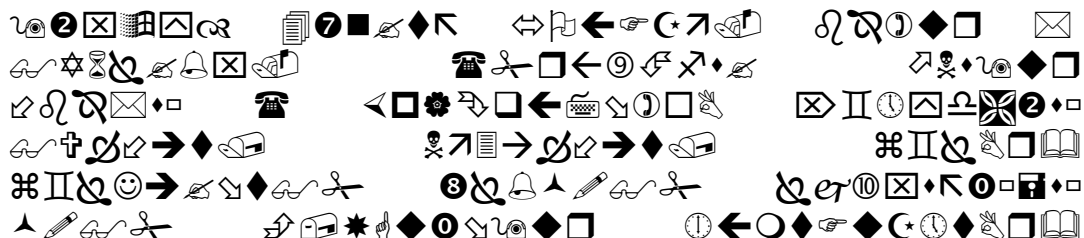
6. Mencegah praktik ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan pertaturan perundang-undang yang berlaku
8. Membina perekonomian rakyat kecil dan menyalurkan kredit atas dasar hukum gadai kepada:
  - a. para petani, nelayan, pedagang mikro dan kecil, indusatri kecil, yang bersifat produktif
  - b. kaum buruh/pegawai negeri yang ekonomi lemah yang bersifat konsumtif.<sup>7</sup>

Landasan hukum yang berhubungan dengan gadai Syariah adalah sebagai berikut:

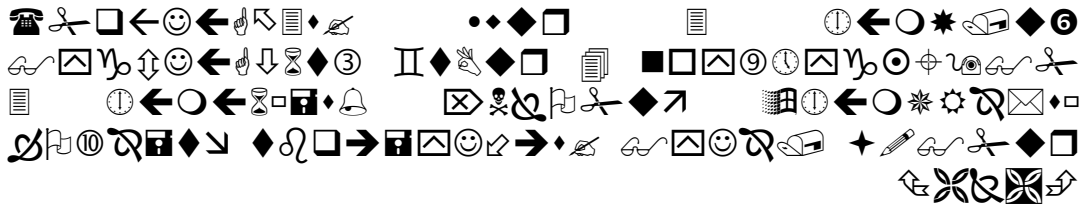
#### 1. Al-quran

Ayat Alquran yang dapat dijadikan dasar hukum perjanjian gadai adalah (QS.

Al-baqarah ayat : 282-283)



<sup>7</sup> Veithzal Rivai, Dkk, *Op. cit.*, h. 1331.



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang[180] (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>8</sup>

Ayat alquran yang lainnya dapat juga dijadikan pedoman dalam melakukan transaksi gadai adalah (QS. Al-Muddatstsir ayat: 38)



Artinay: “ Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.<sup>9</sup>

## 2. Hadits

( عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعما ما من يهودي الى اجل ورهنه درعا من حديد )

Artinya: “Aisyah r.a berkata, bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.”(HR Bukhari dan Muslim)

## 3. Ijtihad

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan Terjemah Edisi Tajwid*, ( Bandung: PT. Syaami Cipta Media, 2006), h. 49.

<sup>9</sup> Departemen Agama Ri Al-Hikmah, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponogoro, 2008), h. 576.

Berhubungan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa di syariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian, mengambil contoh dari perbuatan Rasulullah saw terhadap riwayat hadis tentang orang Yahudi tersebut di Madinah. Adapun keadaan dalam perjalanan seperti dalam alquran dalam surat Al-baqrah ayat:283, karena melihat kebiasaan dimana pada umumnya *rahn* dilakukan pada waktu bepergian.

Asy-syafi'i menyatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang yang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib tidak ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan *akad* (setelah *akad*) orang yang menggadaikan (*rahn*) dipaksakan untuk menyerahkan *borg* (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadaian (*murtahin*). Jika *borg* sudah berada di tangan pemegang gadaian (*murtahin*) orang yang menggadaikan (*rahn*) mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Asy Syfi'i yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan/membahayakan pemegang gadai.<sup>10</sup>

## **2. Aspek Pendirian Pegadaian Syariah**

Dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian Pegadaian Syariah tersebut diantaranya:

### **1. Aspek Legalitas**

---

<sup>10</sup> Heri Sudarsono, *Op. cit*, h. 159.



Mendirikan lembaga Gadai Syariah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin pemerintah, sebagaimana peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM), pasal 3 ayat 1a, menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian disebutkan pada pasal 5 ayat 2b, yang menyatakan pencegahan praktik ijon, riba, pinjaman tidak wajar lainnya. Pasal-pasal tersebut dapat dijadikan legalitas bagi berdirinya Pegadaian Syariah.

## 2. Aspek Permodalan

Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar, karean selain diperlukan untuk peminjaman kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk menyimpan barang gadai, demikian juga biaya operasional sehari-hari yang dikeluarkan oleh pegadaian itu sendiri. Permodalan gadai Syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang (*musyarakah*), atau dengan mencari sumber dana (*shahibul mal*), seperti bank atau perorangan untuk mengelolah perusahaan gadai Syariah (*mudharabah*).<sup>11</sup>

## 3. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

---

<sup>11</sup> Heri sudarsono, *op. cit*, h. 165.

Keberlangsungan Pegadaian Syariah sangat ditentukan oleh kemampuan SDM nya yang harus memahami sistem operasionalisasi gadai Syariah. Kemampuan analisis mengenai investasi yang dapat mendatangkan hasil yang baik dan masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan penggunaan uang gadai, terutama dalam melakukan penaksiran atas barang gadai

#### 4. Aspek Keuangan

Perusahaan gadai Syariah membawa misi syiar Islam, oleh karena itu harus dapat diyakini bahwa seluruh proses operasional dilakukan tidak menyimpang dari prinsip syariah Islam. Praktik gadai yang dilakukan semaksimal mungkin menghindari praktik bisnis yang mengandung unsur-unsur *riba*, *gharar* dan *maisir*. Oleh karena itu setiap pelaksanaan operasional yang dilakukan dalam praktik gadai Syariah dikonsultasikan kepada Dewan Pengawa Syariah (DPS).

#### 5. Aspek Sistem dan Prosedur

Pelaksanaan sistem dan prosedur dalam pelaksanaan gadai Syariah di Perum pegadaian adalah sistem lembaga keuangan modern yang mengutamakan efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis. Oleh karena itu, semua sistem dan prosedur yang dijalankan di Pegadaian Syariah bertujuan untuk memudahkan

bagi para nasabah dalam mengakses perjanjian utang-piutang dengan pihak Cabang Pegadaian Syariah yang ada di seluruh Indonesia.<sup>12</sup>

#### 6. Aspek Pengawasan

Aspek pengawasan dari suatu usaha perusahaan gadai Syariah adalah sangat penting karena untuk menjaga-jaga agar supaya Pegadaian Syariah tetap melayani perinsip Syariah, maka dari itu gadai Syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariaha bertugas megawasi operasionalisasi gadai Syariah supaya sesuai dengan perinsip-perinsip Syariah.<sup>13</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Gadai

- **Syarat gadai diantaranya:**

1. *Sighiat*.

Syarat *sighat* tidak boleh terkait dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya: *rahin* mensyaratkan apabila tanggung waktu *murtahin* habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahin* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta akad disaksikan dua orang.

---

<sup>12</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 57.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Op. cit*, h. 166.

## 2. Orang yang berakad

Baik *rahin* maupun *murtahin* harus cukup dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad.<sup>14</sup>

## 3. *Marhun bih*

Merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*; merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

## 4. *Marhun*

*Marhun* harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*, *marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan; *marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*; merupakan harta yang utuh, tidak berpisah di beberapa tempat.<sup>15</sup>

### • Rukun gadai (*Rahn*)

1. Pihak yang menggadaikan (*rahin*)
2. Pihak yang menerima gadai (*murtahin*)
3. Objek yang digadaikan (*marhun*)
4. Hutang (*marhun bih*)
5. Ijab qabul (*sighat*)<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2009), h. 31.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Susanto Zulkifli, *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 29.

#### **4. Barang Yang Boleh di Gadaikan dan Jaminan Gadai**

Jenis barang berharga yang dapat diterima dan dapat dijadikan barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak antar lain:

1. Barang atau benda-benda perhiasan diantaranya:
  - a. Emas
  - b. Perak
  - c. Intan<sup>17</sup>
  - d. Berlian
  - e. Mutiara
  - f. Platina
  - g. Jam
2. Barang-barang yang berupa kendaraan seperti:
  - a. Mobil
  - b. Sepeda motor
  - c. Sepeda biasa (termasuk becak)
3. Barang-barang elektronik antara lain:
  - a. Televisi
  - b. Radio
  - c. Radio tape
  - d. Video

---

<sup>17</sup> Kasmir, *Op. cit*, h. 250.

- e. Komputer
  - f. Kulkas
  - g. Testel
  - h. Mesin Tiks
4. Mesin-mesin seperti:
- a. Mesin jahit
  - b. Mesin kapal motor
5. Barang keperluan rumah tangga diantaranya:
- a. Barang Tekstil, berupa pakaian, atau kain batik
  - b. Barang-barang pecah belah dengan catatan bahwa semua barang-barang yang dijaminkan haruslah dalam kondisi baik dalam arti masih dapat dipergunakan atau bernilai. Hal ini bagi pegadaian penting mengingat apabila nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman, maka barang jaminan akan dilelang sebagai penggantinya,<sup>18</sup> apabila hasil lelang tersebut uangnya berlebih dari pinjaman si nasabah, maka pegadaian wajib mengembalikan sisah uang tersebut, dan nasabah berhak menerimanya.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

## **B. Usaha Mikro dan Kecil**

### **1. Defenisi**

Perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia mendapat perhatian yang sangat baik dari pemerinatah maupun dari kalangan masyarakat luas, terutama kelompok unit usaha tersebut dapat memberikan kesempatan kerja bagi orang yang belum bekerja atau dalam pengangguran. Oleh karena itu menjadi sumber penting bagi menciptakan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>19</sup>

Dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, usaha mikro dan kecil mudah di kenal dan mudah dibedakan dari usaha besar. Awalil Rizky (2008) menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha informal yang memiliki aset, modal, omzet yang amat kecil. Dari segi ciri lainnya adalah jenis komoditi usahanya sering berganti, tempat usahanya kurang tepat, tidak dapat dilayani oleh perbankan dan pada umumnya tidak memiliki legalitas usaha. Sedangkan usaha kecil menunjuk kepada kelompok usaha yang lebih baik dari pada usaha mikro.<sup>20</sup>

Usaha mikro adalah usaha yang kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan bersifat tradisional dan informal dalam arti belum terdaftar dan berbadan hukum, milik warga Indonesia, dan memiliki hasil penjualan pertahun paling besar 100.000.000 dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak 50.000.000.

---

<sup>19</sup> Tulus T.H. Tambunan, *Prekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, (Jakada: Galiga Indonesia, 2003), h. 307.

<sup>20</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distibutif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: Raja Pres, 2009), h. 42.

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 dan milik Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia kepada semua Bank Umum di Indonesia No. 3/9 BKr, Tgl. 17 Mei 2001, dalam pasal 5, UUUK adalah usaha yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan tempat usaha
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
- c. Milik Warga Negara Indonesia
- d. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar
- e. Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.<sup>21</sup>

Dapat dilihat secara umum sektor usaha kecil memiliki karakteristik sebagai berikut:

---

<sup>21</sup> *Ibid.*



- 1 Sistem pembukuan yang relatif sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan yang standar
- 2 Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi
- 3 Modal terbatas
- 4 Pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas
- 5 Skala ekonomi yang terlalu kecil, sehingga sulit untuk mengharapakan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang
- 6 Kemampuan pemasaran dan negosiasi pada pasar sangat terbatas
- 7 Kemampuan untuk memperoleh sumber dana dari pasar modal rendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana di pasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan.<sup>22</sup>

## **2. Landasan Hukum Usaha Mikro dan Kecil**

Keberadaan usaha kecil sebagai bagian dari pelaku usaha di Indonesia semakin eksis dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tanggal 26 Desember 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 tahun 1995 tentang Undang-undang Usaha Kecil (UUUK). Arti pentingnya usaha kecil dalam dunia usaha tercermin dari dasar pertimbangan di keluarkannya Undang-Undang

---

<sup>22</sup> Pandi Anoraga, SE. MM, *Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007) h. 51.

Usaha Kecil bawa dalam pembangunan nasional, usaha kecil sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang yang berdasarkan demokrasi ekonomi. Bahwa sehubungan hal tersebut, usaha kecil perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi pada masa yang akan mendatang

Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas pada masyarakat dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.

Dalam penjelasan Umum UUUK disebutkan:

*“Usaha kecil yang merupakan bagian integral dunia usaha nasional mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan Pembangunan Nasional pada umumnya dan tujuan ekonomi pada khususnya.”<sup>23</sup>*

Dalam Undang-Undang No 9 tahun 1995 tentang usaha kecil Pasal 8 dijelaskan upaya pemerintah untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat, yaitu:

- 1). Meningkatkan kerja sama usaha kecil dalam bentuk koperasi dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil

---

<sup>23</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), Cet. III, h. 89.

- 2). Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopol, yang merugikan usaha kecil
- 3). Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan pasar<sup>24</sup>

Kebijakan pemerintah yang lain adalah pembinaan UKM. UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, Pasal 17, menyatakan bahwa pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan dalam sumber daya manusia (SDM), disamping penguatan SDM dan upaya menumbuhkan manajemen kewirausahaan, pemerintah juga melakukan pembinaan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 18, yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan dibidang teknologi produksi dan pengendalian mutu
2. Meningkatkan kemampuan dibidang penelitian untuk mengembangkan desain dan teknologi baru
3. Memberi insentif kepada UKM yang merupakan teknologi baru dan melestarikan lingkungan hidup
4. Meningkatkan kemampuan memenuhi standardisasi teknologi
5. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan pengembangan di bidang desain dan teknologi bagi usaha kecil.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Euis Amalia. *Op cit.* h. 263.

Dalam upaya meningkatkan kesempatan dan kemampuan usaha kecil, telah dikeluarkan berbagai kebijaksanaan oleh pemerintah tentang pencadangan usaha kecil menjadai tangguh, mandiri, dan juga dapat berkembang menjadi usaha menengah sehingga dapat meningkatkan produk nasional, kesempatan kerja, ekspor, serta pemerataan hasil-hasil pembagunan yang pada gilirannya akan memberikan sumbagan yang lebih besar terhadap penerimaan Negara. Selanjutnya pemberdayaan usaha kecil akan meningkatkan kedudukan serta peran usaha kecil dalam prekonomian nasional sehingga akan terwujud tatanan prekonomian nasional yang sehat dan kukuh.

### **3. Jenis-Jenis Usaha Mikro dan Kecil**

Pada saat sekarang ini banyak ragam jenis usaha mikro dan kecil, tetapi penulis hanya menguraikan secara garis besarnya saja dan dikelompokkan dalam 4 kelompok:

- 1) Usaha Perdagangan diantaranya:
  - a. Keagenan meliputi agen Koran, agen majalah, agen sepatu, agen pakaian
  - b. Pengeceran meliputi pengecer minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan
  - c. Sektor Informal meliputi pengumpulan barang-barang bekas, pedagang kaki lima, dan lain sebagainya
- 2) Usaha Pertanian diantaranya:
  - a. Perkebuanan meliputi pembibitan, kebun buah-buahan, kebun sayur-sayuran
  - b. Peternakan Meliputi ternak ayam, bebek, sapi, kambing dan susu sapi, perikanan

- c. Darat dan laut meliputi tambak udang, kolam ikan dan lain-lain
- 3) Usaha industri diantaranya industri makanan, industri minuman, industri pertambangan, pengrajinan tangan dan lain sebagainya
- 4) Usaha Jasa meliputi jasa konsultan, restoran, jasa transportasi, jasa telekomunikasi dan jasa guru

### **C. Tinjauan Islam Tentang Gadai dan Usaha Mikro dan Kecil**

Dalam Islam gadai dikenal dengan istilah *Ar-rahn* adalah sebuah akad utang-piutang yang disertai dengan jaminan atau agunan. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan dengan cara sukarela atas dasar tolong menolong. Disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Dalam Islam tidak dikenal bunga uang dengan demikian dalam transaksi *rahn* (gadai Syariah) pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya, akan tetapi bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *marhun* (barang jaminan/agunan).

Adapun hukum pemanfaatan barang gadai oleh penggadai dan pemilik barang gadai, pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang maupun oleh penggadai, kecuali apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan dengan sebab pemilik barang tidak memiliki lagi haknya secara sempurna. Akan tetapi, “jika penggadai meminta diizinkan untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari barang gadai, maka hasilnya menjadi

milik bersama (*production sharing*). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari diri harta benda tidak berfungsi (*mubazir*)". (Syaiikh Mahmud Syalthut, *Al-Fatawa*).<sup>26</sup>

Dalam Islam hikmah gadai sangat besar, karena orang yang menerima gadai membantu menghilangkan kesediaan orang yang menggadaikan, yaitu kesedihan membut pikiran dan hati kacau. Di antara manusia ada yang membutuhkan harta berupa uang untuk mencapai kebutuhannya, maka pada hakikatnya tujuan gadai itu adalah untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap sesuatu dan tidak juga merugikan orang lain, karena Islam memberikan tuntutan agar kita sebagai manusia untuk saling tolong menolong.

Islam memberikan jalan keluar bagi yang berkesulitan, sedang ia mempunyai sesuatu barang berharga dapat dijadikan jaminan, pada hakikatnya yaitu memberikan jaminan kepada orang yang berpiutang sebagai usaha untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap sesuatu, sementara orang yang berpiutang mempunyai barang yang bergerak (barang yang dapat digadaikan). Jadi, pada perinsipnya adalah untuk tolong menolong diantara sesama dalam batas-batas pemberian jaminan.<sup>27</sup>

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk berusaha karena salah satu anjuran Islam menyatakan bahwa "tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah". Artinya memberi orang yang berkemampuan jauh lebih mulia dari menerima. Berusaha untuk mencari rezeki secara hakikat yang terbaik menurut Islam adalah melakukan usah sendiri, baik usah perdagangan maupun usaha yang lainnya,

---

<sup>26</sup> Veithzal Rivai dan Dkk. *Op citi*, h. 1342.

<sup>27</sup> <http://meetabied.Wordpress.Com/> 2009/10/30/ Tinjauan Umum tentang pegadaian menurut Islam.

seperti yang telah dicontohkan oleh nabi Muhammad Saw, ketika beliau belum menjadi Rasul, ia seorang pengusaha atau pembisnis.

Islam memerintahkan agar umatnya melaukan usaha bisnis yaitu:

1. Berbisnis atau Berusaha bagian dari penghidupan
2. Berbisnis atau berusaha mencari ridho Allah bukan untung semata.
3. Berusaha dengan giat kerja keras
4. Berusaha dengan perilaku yang mulia dalam Islam.<sup>28</sup>

Dalam ekonomi Islam melakukan usaha tidak hanya untuk mencari keuntungan saja akan tetapi, juga tujuan beribadah. Dalam ekonomi Islam melarang mengambil keuntungan yang berlipat ganda karena menganiaya para pembeli

Peran penting usaha mikro dan kecil dalam menyangga kehidupan kita sudah tidak ada keraguan lagi, baik dilihat dari dukungan politik maupun realitas kehidupan ekonomi karena usaha mikro dan kecil adalah tempat para pengusaha untuk bekerja dan meningkatkan taraf kehidupan. Dalam perkembangan usaha mikro dan kecil perbankan dan lembaga keuangan syariah lainnya perlu memperhatikan para pengusaha terutama usaha mikro dan kecil dalam pembiayaan maupun permodalan.

Melakukan usaha baik usaha mikro dan kecil maupun yang lainnya, yang diperoleh dengan bekerja keras membanting tulang, mandi keringat dengan tujuan mencari rezeki yang halal itulah yang di anjurkan Islam.

Dari uraian di atas dapat menyimpulkan pengembangan model ekonomi Islam harus menjadi agenda pengkajian terus menerus oleh ekonomi dan ulama untuk

---

<sup>28</sup> Guzali Saydam, *Panduan Lengkap Pengantar Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2006). h. 66.

menemukan prinsip-prinsip berekonomi yang baik demi kesejatraan dan kebaikan hidup umat manusia. Pengembangan usaha lembaga keuangan Syariah maupun lembaga keuangan lainnya sangat penting untuk mendukung para pengusaha mikro yang masih bersifat tradisional dan mempunyai omzet yang kecil, agar tercipta prekonomian yang Islami yang dapat meningkatkan prekonomian nasional serta meningkatkan kesejatraan masyarakat.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Peranan produk *Arrum* dalam pengembangan usaha mikro dan kecil

##### 1. Perkembangan Produk *Arrum* pada Saat ini

Produk *Arrum* adalah skim pemberian pembiayaan berprinsip Syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pemberian yang dilakukan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan sistem pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran disertai berupa jaminan BPKB motor dan mobil.<sup>1</sup>

Perkembangan produk *Arrum* pada saat ini mengalami kemajuan yang cukup baik, terlihat dari perkembangan yang ada di Unit Pegadaian Syariah Pekanbaru telah banyak memanfaatkan produk *Arrum* dikalangan para pengusaha mikro dan kecil akan tetapi, perkembangan produk *Arrum* di Cabang Pegadaian Syariah Pandau Permai kurang berkembang di bandingkan di Unit Pegadaian Syariah, tetapi produk *Arrum* yang ada di Cabang Pegadaian Syariah Pandau Permai masih tetap berjalan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan produk *Arrum* kurang berkembang di Cabang Pegadaian Syariah Pandau Permai adalah sebagai berikut:

1. Terjadinya persaingan ketat antara *Baitul Maal wat Tamwil* (MBT), sehingga para pengusaha lebih cenderung ke BMT.

---

<sup>1</sup> Brosur Pegadaian Syariah, 2009.

2. Dikarenakan produk ini masih baru dikembangkan sehingga produk ini masih ada para pengusaha mikro dan kecil belum mengenalnya
3. Letak Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai diantara perbatasan Siak Hulu Kampar dan Pekanbaru, sehingga sulit untuk menarik pengusaha mikro dan kecil yang ingin memanfaatkan produk *Arrum*
4. Letak daerah Cabang Pegadaian Syariah Pandau permai masih dalam pemekaran dan tidak di kelilingi oleh para pengusaha mikro dan kecil<sup>2</sup>

## **2. Penggunaan produk *Arrum* terhadap pengusaha mikro dan kecil**

Produk *Arrum* hanya dapat digunakan oleh pengusaha mikro dan kecil untuk pengembangan usaha dan penambahan modal, selain daripada itu tidak dapat dimanfaatkan hal yang lain seperti, biaya hidup, keperluan konsumsi maupun biaya pendidikan.

## **3. Tujuan di Terbitkan Produk *Arrum***

Tujuan Pegadaian Syariah menerbitkan produk *Arrum* adalah untuk membantu para pengusaha mikro dan kecil yang telah berjalan minimal satu tahun dalam kondisi produktif yang sedang kekurangan modal atau dalam pengembangan usaha dengan cara memberikan pinjaman atau pembiayaan.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Muthia Darma, (Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Pandau Permai), Wawancara 17 Juni di Pekanbaru. 2010

<sup>3</sup> Hamzal Fuad, (Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pandau Perami) Wawancara 21 Juni di Pekanbaru, 2010.

#### **4. Perkembangan pengusaha mikro dan kecil yang telah menggunakan produk *Arrum***

Keberadaan produk *Arrum* yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah yang dikembangkan pada saat ini dapat memberikan peranan yang cukup baik kepada para pengusaha mikro dan kecil, hal ini dapat dilihat pada pengusaha yang memanfaatkan produk ini dapat menambah modal usaha. Sebagian besar usahanya yang dijalani mengalami kemajuan, sehingga pola prekonomian yang dibangun pengusaha mikro dan kecil dapat dikatakan mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup baik, setelah memanfaatkan produk *Arrum*.<sup>4</sup>

### **B. Pelaksanaan produk *Arrum* pada Pegadaian Syariah Pandau Permai**

#### **1. Cara Pegadaian Syariah Memperkenalkan Produk *Arrum***

Keberadaan produk *Arrum* yang dimiliki oleh Pegadaian Syariah yang diperuntukkan kepada pengusaha mikro dan kecil yang diperkenalkan pada saat ini melalui media cetak maupun melalui arisan pengajian Ibu-ibu serta penyebaran brosur sehingga produk ini dapat dikenal dan berkembang di masyarakat luas.<sup>5</sup>

#### **2. Bentuk produk *Arrum***

Produk *Arrum* merupakan bentuk pembiayaan atau pinjaman individual yang diberikan oleh pengusaha mikro dan kecil dengan disertai berupa jaminan pembiayaan secara gadai dalam bentuk fidusia.

---

<sup>4</sup> Toto Widiyanto, (Perwakilan dari Pimpinan Pegadaian Syariah Pandau Permai), Wawancara, 17 Juni di Pekanbaru . 2010.

<sup>5</sup> Hamzal Fuad, *Loc.cit*.

Syarat-syarat untuk mendapatkan pembiayaan *Arrum* adalah sebagai berikut:

1. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli BM, Kota (Motor Tahun. 2006 ke atas> Mobil Tahun. 2000 Ke atas ) atas nama sendiri
2. Photocopy BPKB, STNK @ 2 lembar
3. Surat izin usaha minimal dari kelurahan atau photocopy Surat Izin Usaha dari Pemerintah (SIUP), Surat Isin Tempat Usaha (SITU), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk badan usaha
4. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri, Kartu Keluarga dan Surat Nikah @ 2 Lembar
5. Surat keterangan domisili dari keluarga (jika alamat KTP tidak sama)
6. Bukti pembayaran PBB/Rekening listrik /air telpon @ 1 lembar
7. Photocopy buku tabungan rekening koran 3 bulan terakhir
8. Pas photo suami dan istri minimal 3x4 @ 2 lembar
9. Photo usaha dan agunan minimal 3R @ 1 lembar
10. Materai 6000 (3 Lembar).<sup>6</sup>

Setelah nasabah memenuhi persyaratan di atas maka pihak pegadaian melakukan peninjauan penilaian dan penelitian terhadap kalangan usaha nasabah yang akan diberikan pinjaman atau pembiayaan *Arrum*:

---

<sup>6</sup> Dokumen Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai.

1. Dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh keamanan baik calon *rahin* dan seberapa besar kemampuan untuk membayar angsuran pinjaman sampai dengan pelunasan pinjaman berikut membayar jumlah *ijarah*
2. Dilakukan melalui analisa data-data pola pormulir permohonan pinjaman *Arrum* yang diajukan calon *rahin* juag harus melalui peninjauan langsung kelokasi usaha
3. Hasil analisa ini ditujukan dalam form *Arrum* II jika salah di *cross check* di form *Arrum* I calon *rahin* dianggap layak untuk diberikan pinjaman, maka lebih diproses pemberian pinjaman
4. Setelah dinyatakan lolos uji analisis kelayakan usaha dan menyetujui pembiayaan yang ditetapkan oleh Kuasa Pemutus *Marhun Bih* (KPM), lalau menandatangani akad pembiayaan *Arrum*
5. Untuk *Marhun Bih* (nilai pembiayaan) di atas telah ditentukan menurut kesepakatan, dan bersama-sama dengan Manajer Cabang Pegadaian Syariah (CPS) menghadap notaris untuk membuat dan menandatangani akad pembiayaan *Arrum* serta membuat akad jaminan fidusia.
6. Menghubungi kasir untuk mencairkan *marhun bih* (nilai pembiayaan).<sup>7</sup>

Dari ketentuan di atas yang telah ditetapkan oleh Pegadaian Syariah, apabila nasabah telah melakukannya, maka nasabah tersebut dinyatakan berhak untuk memanfaatkan produk *Arrum* dengan tujuan untuk usaha yang baik dan tidak dilarang oleh pemerintah dan menurut pandangan Islam.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

### 3. Akad yang dilakukan terhadap nasabah yang mendapatkan produk *Arrum*

Bagi nasabah yang menggunakan produk *Arrum* akad yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap nasabah adalah akad pembiayaan dengan *tarif Ijarah*, atas dasar kesepakatan yang dibuat bersama antara *rahin* (penerima pembiayaan) dan *murtahin* (Pegadaian Syariah) atas jumlah pinjaman dengan kondisi yang telah diperjanjikan, pihak *rahin* wajib mengembalikan pinjaman yang telah diterima dari *murtahin* dalam jangka waktu yang telah disepakati. Oleh karena Produk *Arrum* sifatnya memberikan pembiayaan bagi pengusaha mikro dan kecil dalam bentuk pinjaman modal usaha dan diikuti dengan agunan atau jaminan fidusia sebagai pengikat atas pinjaman nasabah, maka jaminan barang tersebut dikenakan *tarif ijarah* dihitung dengan berdasarkan nilai taksiran jaminan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dan dapat dilihat pada contoh di bawah ini:

Seorang nasabah mengajukan pembiayaan *Arrum* untuk pengembangan usaha dengan berupa jaminan 1 buah mobil kijang LGX tahun 2002 dengan taksiran berdasarkan harga pasar.

Nilai taksiran barang Rp. 70.000.000

Jadi pinjaman yang dapat diterima:

Rp. 70.000.000 X 70% = Rp 49.000.000

Biaya Administrasi: Rp. 200.000

Ijarah:

$\frac{\text{Rp } 70.000.000}{\text{Rp. } 100.000} \times \text{Rp } 700 = 490.000/ \text{ perbulan.}$

Dari contoh di atas dapat dijelaskan bahwa nilai taksiran barang jaminan pembiayaan nasabah sebesar Rp. 70.000.000. sedangkan pembiayaan yang dapat diberikan oleh nasabah 70% dari nilai taksiran. Jadi pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah sebesar Rp. 49.000.000. dan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 200.000 yang dibayar pada awal transaksi. Sedangkan penentuan *ijarah* dihitung berdasarkan dengan nilai taksiran barang jaminan dari Rp. 70.000.000 : 100.000 X 700 = 490.000. Jadi *ijarah* yang harus dibayar nasabah sebesar Rp. 490.000 perbulan dan ditambah dengan angsuran pinjaman yang telah disepakati.

#### **4. Serah terima barang yang menjadi objek jaminan pada saat menerima**

Pada saat penyerahan barang yang dijadikan objek jaminan, barang tersebut diterima pada awal sebelum pencairan dana pinjaman nasabah, yang mana barang jaminan tersebut yang dijadikan objek jaminan adalah barang milik sendiri dan dalam kondisi yang baik.

Penyerahan jaminan dilakukan secara fidusia dengan menggunakan akad jaminan fidusia yang merupakan bagian tidak terpisah dari akad ini. Jadi barang yang dijadikan jaminan hanyalah surat bukti kepemilikan dan tidak disertai dengan barangnya. Contohnya dapat dilihat pada sepeda motor yang dijadikan jaminan hanya BPKB nya, sedangkan sepeda motornya diserahkan kembali kepada nasabah dengan kesepakatan barang jaminan yang dipegang oleh nasabah wajib dipelihara/dijaga, dan segala resiko kerusakan atau kehilangan selama jangka waktu akad atau pembiayaan belum lunas, maka nasabah harus bertanggung jawab.

## **5. Cara penaksiran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap barang jaminan nasabah**

Cara penaksiran yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah terhadap objek jaminan barang nasabah adalah barang tersebut dilihat kondisinya serta tahun pemakaian.<sup>8</sup> Untuk mobil produksi Jepang 15 tahun terakhir kondisi 75%, mobil produksi Eropa 10 tahun terakhir kondisi 75%, mobil produksi Korea 10 tahun terakhir dalam kondisi 75% serta kendaraan roda dua ( motor) yang diterima hanya produksi Jepang 5 tahun terakhir dalam kondisi 75%.<sup>9</sup> Setelah barang tersebut ditaksir oleh juru taksir, maka penaksir menentukan harga barang jaminan tersebut dengan disesuaikan harga pasar setempat.

## **6. Proses jangka waktu pencairan dana terhadap nasabah yang mengajukan pinjaman melalui produk *Arrum***

Proses pencairan dana terhadap nasabah yang mengajukan pembiayaan/pinjaman melalui produk *Arrum*, tergantung dari nasabah yang mengajukan pembiayaan, apabila nasabah cepat melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan sebagai mana yang telah disebutkan pada halaman 53-55, maka pihak pegadaian melakukan proses pengajuan pembiayaan nasabah dalam jangka waktu paling cepat 3 hari dan paling lama 7-15 hari, pencairan dana dapat dilakukan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Toto Widiyanto, (Perwakilan dari Pegadaian Syariah Pandau Permai), Wawancara 17 Juni 2010.

<sup>9</sup> Buku panduan Pegadaian Syariah, ( Tentang Produk *Arrum* ), h. 50.

<sup>10</sup> Toto Widiyanto . *Loc. Cit.*



Berikut ini penulis sajikan tanggapan responden tentang lama pemanfaatan fasilitas produk *Arrum* dapat dilihat pada tabel di bawa ini:

**Tabel IV. 1**  
Tanggapan responden tentang lama pemanfaatan fasilitas pembiayaan prodak *Arrum* pada Pegadaian Syariah Pandau Permai

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	< 1 Tahun	5	42%
2	1-3 Tahun	7	58%
3	> 3 Tahun	-	-
<b>Jumlah</b>		12	100%

Sumber: Data Olahan 2008-2010

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang lama pemanfaatan fasilitas pembiayaan produk *Arrum* pada Pegadaian Syariah Pandau Permai, yang kurang dari 1 tahun sebanyak 42% dan 1-3 tahun sebanyak 58% sedangkan yang lebih dari 3 tahun tidak ada. Diantara 12 responden terdiri dari pengusaha mikro dan kecil. 2 responden dari pengusaha mikro telah memanfaatkan produk *Arrum* < 1 tahun selebihnya kalangan pengusaha kecil, sedangkan yang lebih dari 1-3 tahun 2 responden dari pengusaha mikro 5 responden pengusaha kecil. Dengan demikian dapat dilihat bahwa pemanfaatan produk *Arrum* oleh nasabah sebagian besar hanya ada periode 1-3 tahun. Hal ini kemungkinan juga disebabkan oleh produk ini merupakan produk baru oleh pihak pegadaian Syariah.

Selanjutnya dapat pula dijelaskan tanggapan responden mengenai kegunaan pembiayaan produk *Arrum*, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut ini:

**Tabel IV. 2**  
Tanggapan responden tentang kegunaan produk *Arrum* bagi nasabah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Pengembangan usaha	4	33%
2	Pembiayaan hidup	-	-
3	Penambahan modal	8	66%
4	Konsumsi	-	-
<b>Jumlah</b>		12	100%

sumber: data olahan 2008-2010

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang kegunaan produk *Arrum* bagi nasabah, yang menyatakan untuk pengembangan usaha sebanyak 33%, untuk penambahan modal sebanyak 67%, sedangkan untuk pembiayaan hidup dan konsumsi tidak ada. Diantara 12 responden terdiri dari pengusaha mikro dan kecil 4 responden dari pengusaha kecil yang mengaku untuk pengembangan usaha sedangkan dari pengusaha mikro tidak ada, sedangkan untuk penambahan modal 4 responden yang mengaku dari pengusaha mikro dan 4 responden dari pengusaha kecil.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian kegunaan produk *Arrum* bagi nasabah adalah untuk pengembangan usaha dan selanjutnya untuk penambahan modal usaha. Untuk itu diharapkan para pengusaha mikro dan kecil yang telah menggunakan produk ini usahanya terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang baik sehingga dapat meningkatkan prekonomian dalam keluarga maupun di masyarakat

Setelah kondisi usaha terus mengalami peningkatan dan kemajuan yang baik, diharapkan para pengusaha mikro dan kecil membawa dampak positif pada perkembangan perekonomian dimasa akan mendatang

Selanjutnya dapat pula dijelaskan tanggapan responden tentang kontribusi produk *Arrum* dalam kelangsungan usaha nasabah sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel IV. 3 berikut ini:

**Tabel IV. 3**

Tanggapan responden tentang kontribusi produk *Arrum* dalam kelangsungan usaha

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	12	100%
2	Ragu-ragu	-	-
3	Tidak setuju	-	-
<b>Jumlah</b>		12	100%

Sumber: data olahan 2008-2010

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang kontribusi produk *Arrum* dalam menentukan kelangsungan usaha, yang menyatakan setuju seluruh responden sebanyak 100%. Yang terdiri dari pengusaha mikro dan kecil 4 responden dari pengusaha mikro dan 8 responden dari pengusaha kecil. Hal ini berarti produk *Arrum* sangat berpengaruh terhadap para pengusaha mikro dan kecil terlihat yang telah memanfaatkan produk ini, kelangsungan usaha nasabah mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup baik, terlihat dari penambahan barang dan persediaan barang dagangannya serta pendapatan yang direima dalam perbulan dapat mengalami

penambahan<sup>11</sup> diharapkan dengan perkembangan dan kemajuan yang dialami dapat meningkatkan prekonomian yang baik serta menghasilkan keuntungan.

Setelah diketahui berhubungan tentang kontribusi produk *Arrum* dalam kelangsungan usaha, bagaimana pula usaha nasabah yang telah memanfaatkan produk *Arrum*, sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV. 4 berikut ini :

**Tabel IV. 4**  
Tanggapan responden tentang kemajuan usaha yang dialami setelah pemanfaatan produk *Arrum*

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	12	100%
2	Ragu-ragu	-	-
3	Tidak setuju	-	-
<b>Jumlah</b>		12	100%

Sumber: data olahan lapangan 2008-2010

Dari tabel di atas dapat diketahui tentang kemajuan usaha yang dialami nasabah setelah memanfaatkan produk *Arrum*, yang menyatakan setuju seluruh responden sebanyak 100%, sedangkan ragu-ragu dan tidak setuju tidak ada. Diantara 12 responden terdiri dari pengusaha mikro dan kecil. 4 responden pengusaha mikro dan 8 responden pengusaha kecil.

Berdasarkan pengakuan responden di atas dapat disimpulkan bahwa produk *Arrum* dapat membantu kalangan para pengusaha mikro dan kecil, hal ini terlihat pada kemajuan yang dialami pengusaha mikro dan kecil yang telah menggunakan *Arrum*, Sehingga usaha yang dijalankan terus mengalami perkembangan dan

---

<sup>11</sup> Toto Widanto (Perwakilan dari Pimpinan pegadaian Syariah Pandau Permai) Wawancara, 15 Juli di Pekanbaru.2010.

kemajuan maupun dari segi pendapatan. Untuk itu diharapkan menjadi seorang pengusaha yang sukses dapat menciptakan prekonomian yang baik khususnya dalam keluarga maupun dimasyarakat serta prekonomian nasional, sehingga menciptakan lapangan pekerjaan dan meyerap pengangguran yang ada di masyarakat.<sup>12</sup>

Setelah diketahui tentang kemajuan usaha yang dialami oleh nasabah setelah memanfaatkan produk *Arrum*, selanjutnya dapat pula di jelaskan tentang penjelasan terperinci dari pihak pegadaian mengenai produk *Arrum*, dapat dilihat tabel IV. 5 berikut ini:

**Tabel IV. 5**  
Tanggapan responden tentang penjelasan yang terperinci dari pihak Pegadaian tentang produk *Arrum*

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	10	83%
2	Tidak	2	17%
	<b>Jumlah</b>	12	100%

Sumber: data olahan 2008-2010

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang penjelasan yang terperinci dari pihak pegadaian tentang produk *Arrum*, yang menyatakan ya sebanyak 83%, dan menyatakan tidak sebanyak 17%, diantara 12 responden di atas terdiri dari kalangan pengusaha mikro dan kecil, 4 responden yang mengaku dari pengusaha mikro, 6 responden yang mengaku dari pengusaha kecil, sedangkan 2 responden menyatakan tidak ada penjelasan terperinci dari pihak pegadaian tentang produk *Arrum* dari kalangan pengusaha kecil, dari pengakuan responden di atas diharapkan para

---

<sup>12</sup> Observasi 28 Juni 2010.

karyawan Pegadaian Syariah Pandau Permai dapat lebih ditingkatkan lagi mengenai penjelasan tentang produk *Arrum*, agar nasabah yang mengambil produk ini betul-betul paham dan mengerti tentang penggunaan produk *Arrum*. Sehingga nasabah yang menggunakan produk ini mengetahui tujuan dan maksud produk tersebut.

Selanjutnya dapat pula disimpulkan tanggapan responden tentang kriteria usaha yang ditetapkan Pegadaian Syariah dalam pemanfaatan pembiayaan *Arrum* sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel IV. 6 berikut ini:

**Tabel VI. 6**  
Tanggapan responden tentang kriteria usaha yang ditetapkan pegadaian dalam pembiayaan *Arrum*

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	12	100%
2	Tidak	-	-
<b>Jumlah</b>		12	100%

Sumber: data olahan 2008-2010

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang kriteria usaha yang ditetapkan pegadaian dalam penggunaan *Arrum*, yang menyatakan ya seluruh responden sebanyak 100%. Yang terdiri dari pengusaha mikro dan kecil, 4 responden yang mengaku dari pengusaha mikro, 8 responden yang mengaku dari pengusaha kecil. Meskipun ada kriteria usaha yang ditentukan dan diharapkan pihak pegadaian tetap selalu ada pengawasan terhadap nasabah tentang pemanfaatan pembiayaan produk *Arrum*, agar nasabah dalam penggunaan produk tersebut tidak dimanfaatkan dengan tujuan yang lain kecuali untuk pengembangan usaha atau penambahan modal usaha.

Selanjutnya dapat pula disimpulkan tanggapan responden tentang prosedur pengajuan pembiayaan *Arrum*, sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV. 7 berikut ini:

**Tabel VI. 7**

Tanggapan responden tentang prosedur pengajuan pembiayaan produk *Arrum* sangat mudah dan tidak berbelit-belit

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	7	58%
2	Ragu-ragu	3	25%
3	Tidak setuju	2	17%
	<b>Jumlah</b>	12	100%

Sumber: data olahan 2008-2010

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang proses prosedur pengajuan pembiayaan produk *Arrum* sangat mudah dan tidak berbelit-belit, yang menyatakan setuju sebanyak 58%, dan ragu-ragu 25%, sedangkan 17% yang menyatakan tidak setuju. Dari 12 responden yang terdiri dari kalangan pengusaha mikro dan kecil, 2 responden dari pengusaha mikro, 5 responden yang menyatakan setuju dari pengusaha kecil, sedangkan menyatakan ragu-raru 2 responden dari pengusaha mikro, 1 responden menyatakan dari pengusaha kecil, sedangkan yang menyatakan tidak setuju 2 responden dari pengusaha kecil.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masih ada responden menyatakan ragu-ragu dan tidak setuju dalam prosedur pengajuan pembiayaan *Arrum* sangat mudah dan tidak berbelit-belit, untuk itu diharapkan perlu ada perubahan dan peningkatan yang lebih baik dalam prosedur pengajuan pembiayaan *Arrum* pada Pegadaian Syariah Pandau Permai, agar nasabah

merasakan kemudahan dan kenyamanan serta cepat dalam prosedur pegajuan pembiayaan dan tidak mengalami kesulitan.

Selanjutnya dapat di jelaskan tanggapan responden tentang akad yang diikuti bagi nasabah yang menggunakan pembiayaan *Arrum*, sebagaimana dapat dilihat pada tabel IV. 8 berikut ini:

**Tabel IV. 8**  
Tanggapan responden tentang adanya akad yang diikuti bagi nasabah yang memanfaatkan pembiayaan *Arrum*

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	12	100%
2	Tidak	-	
<b>Jumlah</b>		10	100%

Sumber: data olahan 2008-2010

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang adanya akad yang diikuti bagi nasabah yang memanfaatkan pembiayaan *Arrum*, yang menyatakan ya seluruh responden sebanyak 100%, yang terdiri dari pengusaha mikro dan kecil 4 responden mengatakan dari pengusaha mikro, 8 responden menyatakan dari pengusaha kecil, bahwasanya ada akad yang diikuti bagi nasabah yang menggunakan produk *Arrum*.

Dengan adanya akad yang di terapkan oleh Pegadaian Syariah terhadap nasabah diharapkan tidak memberatkan dan mempersulit bagi nasabah yang mengambil pembiayaan dalam pemanfaatan produk *Arrum*, maka dari itu diharapkan bagi nasabah mematuhi akad yang telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah agar tetap terjalin hubungan baik diantara kedua belah pihak.



Setelah diketahui mengenai ketentuan akad pembiayaan *Arrum*, selanjutnya dapat pula disimpulkan tanggapan responden tentang pemahaman akad bagi nasabah, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel IV. 9 di bawah ini:

**Tabel IV. 9**

Tanggapan responden tentang pemahaman akad yang dilakukan sangat mudah dipahami bagi nasabah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	9	75%
2	Ragu-ragu	3	25%
3	Tidak setuju	-	-
<b>Jumlah</b>		12	100%

Sumber: data olahan 2008-2010

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang akad yang dilakukan sangat mudah dipahami bagi nasabah, yang menyatakan setuju sebanyak 75%, dan ragu-ragu 25% sedangkan tidak setuju tidak ada. Yang terdiri dari kalangan pengusaha mikro dan kecil, 4 responden yang menyatakan setuju dari pengusaha mikro, 5 responden dari pengusaha kecil sedangkan menyatakan ragu-ragu 3 responden dari pengusaha kecil.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih ada yang mengatakan ragu-ragu tentang pemahaman akad, hal ini kemungkinan dikarenakan kurangnya penjelasan terperinci terhadap nasabah tentang produk *Arrum*. Untuk itu perlu ada perubahan dan penjelasan yang lebih baik dan terperinci terhadap akad yang dilakukan oleh pegadaian terhadap nasabah tentang pembiayaan *Arrum*, agar nasabah mengerti dan dapat memahami lebih mendalam akad tersebut.

Selanjutnya dapat pula di jelaskan tanggapan responden tentang pelunasan pembiayaan yang dilakukan nasabah sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel IV. 10 berikut ini:

**Tabel IV. 10**

Tanggapan responden tentang cicilan pelunasan pembiayaan yang dilakukan bagi nasabah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Harian	-	-
2	Mingguan	-	-
3	Bulanan	12	100%
	<b>Jumlah</b>	12	100%

Sumber: data olahan 2008-2010

Dari tabel di atas dapat diketahui tentang cicilan pelunasan pembiayaan yang dilakukan bagi nasabah, yang menyatakan bulanan seluruh responden sebanyak 100%, sedangkan yang menyatakan mingguan dan harian tidak ada. Dari pengakuan responden tersebut terdiri dari pengusaha mikro dan kecil, 4 responden dari pengusaha mikro dan 8 responden dari pengusaha kecil. Dari pengakuan tersebut dapat diketahui bahwa sistem pelunasan yang diterapkan oleh pegadaian Syariah dalam produk *Arrum* adalah bulanan.

Untuk itu diharapkan bagi nasabah yang mengambil pembiayaan *Arrum* dalam pelunasan pinjaman berjalan dengan lancar dan tepat pada waktunya yang telah disepakati bersama agar hubungan tetap terjalin dengan baik diantara kedua belah pihak nasabah dengan pegadaian.

Selanjutnya dapat pula dijelaskan tanggapan responden tentang serah terima barang jaminan yang dilakukan antara nasabah dengan pihak pegadaian, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel IV. 11 berikut ini:

**Tabel IV. 11**

Tanggapan responden tentang pelaksanaan serah terima barang jaminan dilakukan dengan prosedur yang sudah sangat baik bagi nasabah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Setuju	10	83%
2	Ragu-ragu	2	17%
3	Tidak setuju	-	-
<b>Jumlah</b>		12	100%

Sumber: data olahan 2008-2010

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang pelaksanaan serah terima barang jaminan dilakukan dengan prosedur yang sudah sangat baik bagi nasabah, yang menyatakan setuju sebanyak 83%, dan ragu-ragu sebanyak 17%, sedangkan yang menyatakan tidak setuju tidak ada. Dari responden di atas terdiri dari pengusaha mikro dan kecil, 4 responden dari pengusaha mikro, 6 responden dari pengusaha kecil yang menyatakan setuju sedangkan menyatakan ragu-ragu 2 responden dari pengusaha kecil.

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan serah terima barang jaminan yang dilakukan oleh pegadaian terhadap nasabah masih ada yang menyatakan ragu-ragu bahwa prosedur sudah sangat baik. Untuk itu perlu ada perubahan dan perhatian dalam prosedur yang lebih baik, agar nasabah merasakan kenyamanan dan kepuasan.

Selanjutnya dapat dijelaskan tanggapan responden tentang jaminan asuransi barang yang di serahkan kepegadaian yang dijadikan jaminan, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel IV. 11 berikut ini:

**Tabel IV. 12**

Tanggapan responden tentang jaminan asuransi atas barang yang diserahkan nasabah

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	12	100%
2	Tidak	-	-
<b>Jumlah</b>		12	100%

Suber: data olahan 2008-2010

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang jaminan asuransi atas barang yang diserahkan nasabah, yang menyatakan iya seluruh responden sebanyak 100%, ada asuransi atas barang jaminan yang diserahkan ke pegadaian. Dari responden di atas terdiri dari kalangan pengusaha mikro dan kecil, 4 responden dari pengusaha mikro, 8 responden dari pengusaha kecil. Diharapkan barang jaminan nasabah tersebut dapat terjaga semaksimal mungkin baik dari segi perawatan maupun tempat penyimpanan barang terjaga kemanan dalam kondisi yang baik, jika terjadi kehilangan barang jaminan nasabah maka barang tersebut akan diganti pihak pegadaian .

Selanjutnya dapat pula dijelaskan tanggapan responden tentang pemantauan oleh petugas tentang penggunaan dana bagi nasabah, sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel IV. 13 berikut ini:

**Tabel IV. 13**

Tanggapan responden tentang adanya pemantauan oleh petugas tentang penggunaan dana bagi nasabah.

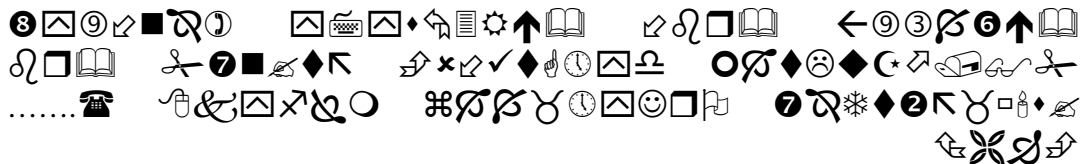
No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Ya	12	100%
2	Tidak	-	-
	<b>Terjadi</b>	12	100%

Suber: data olahan 2008-2010

Dari tabel tersebut dapat diketahui tentang adanya pemantauan oleh petugas tentang penggunaan dana bagi nasabah, yang menyatakan iya seluruh responden sebanyak (100%), yang terdiri dari pengusaha mikro dan kecil, 4 responden dari pengusaha mikro, 8 responden dari pengusaha kecil, dari pernyataan tersebut tidak ada yang menyatakan tidak ada pengawasan, di karenakan pembiayaan produk *Arrum* hanya diperuntukkan untuk usaha mikro dan kecil dan tidak dibenarkan untuk keperluan konsumtif, biaya sekolah, maupun keperluan konsumsi.

Dari data di atas, diharapkan petugas tersebut mempertahankan dalam pengawasan nasabah dalam penggunaan pembiayaan *Arrum*, dan diharpkan juga bagi nasabah dana tersebut betul-betul di manfaatkan untuk penambahan modal atau pengembangan usaha, sehingga mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang halal.





Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".<sup>27</sup> Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun ( QS. Al-Qashash: 26-27).<sup>15</sup>

Sedangkan dalam pelaksanaan peyerahan barang jaminan yang dilakukan pegadaian terhadap nasabah yang mengambil pembiayaan *Arrum*, bahwasanya barang jaminan pembiayaan tersebut diserahkan diawal sebelum pencairan dana pebiayaan *Arrum* dengan penyerahan jaminan dilakukan secara *fidusia*, setelah diterima barang jaminan tersebut, maka dibuat akad kesepakatan tentang barang jaminan pembiayaan.

Akad yang diterapkan dalam barang jaminan nasabah yang menggunakan pembiayaan produk *Arrum* adalah akad jaminan *fidusia*. Yang mana jaminan *fidusia* ini yang dijadikan jaminan pembiayaan adalah surat bukti kepemilikan barang atas nama milik sendiri dan tidak dalam penguasaan orang lain atau tidak sebagai objek sengketa. Sedangkan *marhun* diserahkan kembali kepada nasabah untuk menyimpan dan merawatnya, jika teradi kerusakan dan kehilangan maka nasabah yang menanggung resikonya. Tetapi *marhun* yang dipegang oleh nasabah boleh dimanfaatkan dan digunakan karena mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Dalam Islam tentanga pemanfaatan dan penggunaan barang gadai

---

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 613.

dibolehkan, jika mendapat izin diantara kedua belah pihak. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab tiga halaman 47-48 alenia kedua

Hal ini telah dijelaskan juga di dalam hadits dari Abu Hurairah r.a dan hadits Nabi saw di bawa ini.

لا يعلق الرهن من صاحبه اذ ي رهنه. له غنمه وعليه غرمه

Artinya: “Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikan. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya” (HR. Asy-Syafi’i, Al-Daraquthhi dan Ibnu Majah)

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عايه وسلم الظهر يركب بنفقته ا ذا كان مرهونا, ولين ا لد ريشرب بنفقته ا ذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب وي ب

النفق

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah saw. Bersabda, Binatang tunggangan apabila digadaikan (dijaminkan) boleh dikendarai sebab memberi nafkahnya. Ternak perah susunya sebab memberi nafkah. Bagi orang yang mengendarai serta meminum susunya wajib memberi nafkah.” (HR. Jama’ah, kecuali Muslim dan An-Nasa’i).<sup>16</sup>

Bahwasanya penulis dapat menyimpulkan pelaksanaan produk *Arrum* pada pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai Siak hulu Kampar yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ekonomi Islam.

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ahmad Az-zubaidi, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari Dari Kitab At-Tajridush Shari*. (Semarang: PT. Karya Toha Putra), h. 481.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah ditemukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pembiayaan produk *Arrum* yang ditawarkan Pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai mempunyai manfaat bagi perkembangan ekonomi khususnya usaha mikro dan kecil. Hal ini dapat dilihat dari usaha yang dijalankan mengalami perkembangan dan kemajuan yang cukup baik.
2. Pelaksanaan produk *Arrum* pada Pegadaian Syariah Pandau Permai dilakukan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana yang telah dijelaskan pada halaman 53-55 pada alenia kedua. Apabila persyaratan tersebut telah dilengkapi oleh nasabah maka pegadaian memberikan pinjaman atau pembiayaan dengan ketentuan bahwa nasabah harus menyerahkan barang jaminan fidusia dan disertai dengan akad pembiayaan dengan *tarif ijarah*.
3. Pelaksanaan produk *Arrum* pada Pegadaian Syariah Pandau Permai telah sesuai dengan ekonomi Islam, karena dalam pengambilan keuntungan tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi, menggunakan *tarif ijarah*.. Serta dapat dilihat pula pada akad yang digunakan terhadap nasabah jelas. Akad yang digunakan adalah akad pembiayaan dengan *tarif Ijarah*.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat ditemukan beberapa saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi Pegadaian Syariah Pandau Permai sebagai berikut:

1. Pegadaian Syariah Pandau Permai merupakan lembaga keuangan lainnya yang memberikan pembiayaan atau pinjaman melalui produk *Arrum* yang diperuntukan untuk usaha mikro dan kecil, diharapkan dimasa yang akan mendatang lebih dikembangkan lagi dan tetap selalu membantu dalam pembiayaan para pengusaha mikro dan kecil dalam pengembangan usaha maupun penambahan modal.
2. Dalam pelaksanaan pengajuan pembiayaan produk *Arrum* proses pengajuan hendaknya dipermudah dan tidak dipersulit terhadap nasabah agar proses pengajuan tersebut tidak menggunakan waktu cukup lama. Serta akad yang diterapkan tetap dipertahankan dimasa yang akan mendatang.
3. Dalam pelaksanaan Produk *Arrum* pada pegadaian Syariah Cabang Pandau Permai diharapkan tetap dipertahankan sebaik-baiknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kwartono, M, 2007. *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Ahmad Az-Zubaidi, Zainuddin, *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari dari Kitab At-Tajridush Shari*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, 2001. *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta: Darul Ulum Press.
- Amalia, Euis, Dr. M.Ag, 2009. *Keadilan Distributif Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Arthesa, Ade dan Handiman, Edia, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, Jakarta: PT. Indeks
- Anoraga, Pandi, SE. MM. 2007. *Pengantar Bisnis Pengelolaan Bisnis dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rinika Cipta
- Buchari Alma, Donni Juni Priansa, 2009. *Manajemen Bisnis Syariah*, Bandung: CV. Alfabeta
- Brosur Pegadaian Syariah, 2008.
- Departemen Agama, 2007. *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro
- Depertemen Agama RI, 2006. *Al-Qur'an dan Terjemah Edisi Tajwid*, Bandung: PT. Syaamil Cipta Media.
- Ghofur Anshori, Abdul, 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah mada University Press.
- Hasan, Ali, *Masil Fiqiyah*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Http://meetabied. Word press. Com / 2009/10/30/ Tinjauan Umum Tentang Pegadaian Menurut Islam.
- Kasmir, SE., MM, 2001. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Mustafa Edwin Nasution dan Dkk, 2007. *Pengantar Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana.
- Rivai, Veithzal Dkk, 2007. *Bank and Financial Instiution Managmen*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saydam Guzali, 2006. *Panduan Lengkap Pengantar Bisnis*, Bandung: Alfabeta.
- Saleh, Hassan, H.E, 2008. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Konterporer*, Jakarta: Rajawali pres.
- Sembiring, Sentosa, Dr. S,H. M.H, 2008. *Hukum Dagang*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Slamet, Dahlan, 1999. *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sudarsono, Heri, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisa
- Syafi'i Antonio, Muhammad, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Tambunan, Tulus, T.H, 2003. *Prekonomian Indonesia Beberapa Masalah Penting*, Jakarta: Galiga Indonesia.
- Wijaya, Faried. 1991. *Perkreditan Bank dan Lembaga-Lembaga Keuangan*, Yogyakarta: BPFE.
- Zainuddin, Ali, 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkifli, Susanto, 2003. *Panduan Praktis Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim.